

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Wide Fund For Nature (WWF) sebagai aktor non profit yang konsen terhadap isu lingkungan yang kemudian saat ini sudah menjadi salah satu isu utama dalam agenda politik internasional.¹ WWF merupakan yayasan yang independen, obyektif dan tidak memihak artinya tidak memiliki hubungan dengan pemerintah, partai politik, organisasi dan individu lainnya. Lembaga ini bergerak secara khusus untuk advokasi kebijakan serta kampanye publik untuk mengejar perubahan sosial. WWF sebagai salah satu *INGO* nirlaba yang bergerak dalam bidang konservasi lingkungan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan mempunyai kontribusi besar bagi lingkungan global sejak didirikan pada tanggal 11 September 1961 di Gland, Swiss. Hingga saat ini, tercatat bahwa WWF memiliki kantor ekonomi yang tersebar di 30 negara di dunia, termaksud di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1962 dan baru diresmikan tahun 1998 menjadi lembaga nasional berbadan hukum yayasan. Sejak itu, WWF Indonesia dan Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung upaya konservasi di Indonesia.² Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian WWF saat ini adalah pemanasan global yang mengancam keanekaragaman hayati khususnya di wilayah perairan yang sangat rentan dengan

¹David Lewis, 2009, "Nongovernmental Organization, Definition and History, [PDF] London School of Economic and Political Science", Pada <http://personal.lse.ac.uk/lewisd/images/encylciv%20societyngos2009-dl.pdf> diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 10.00 WIB

²World Wide Fund For Nature (WWF), "Tentang Kami: Sejarah WWF Indonesia", Pada http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/. Diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 15.20 WIB

eksploitasi sumber daya laut. Salah satu contohnya yakni penangkapan ikan secara *destruktif* yaitu pemboman dan pembiusan ikan yang dapat mengancam keberlanjutan spesies ekosistem laut.

Saat ini, fokus kerja WWF-Indonesia adalah tempat-tempat penting yang menjadi pusat keanekaragaman hayati tertinggi dunia, yang umum dikenal dengan nama *Global 200 Ecoregion*, dimana 19 diantaranya ada di Indonesia. Program konservasi yang dikerjakan, mencakup bentang lahan (*landscape*) dan bentang laut (*seascape*) yang tersebar di 28 lokasi di 17 propinsi di Indonesia. Membawahi tiga *bioregion*, yaitu Sundaland (Sumatra, Kalimantan dan Jawa), Wallacea (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku) dan Sahul (Papua). Pendanaan WWF Internasional didapatkan dari pihak perorangan (swasta) dan warisan sebesar 57%, sumber-sumber internasional seperti (Bank Dunia, DFID, USAID) 17%, dan 11% dari berbagai perusahaan serta sisanya dari para anggota. WWF hadir di Indonesia membawa visi dan misi yaitu untuk menjaga, melestarikan dan mengelolah ekosistem sumber daya alam Indonesia secara berkeadilan, baik yang ada di darat maupun di laut.³ Sebagai negara maritim yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan, Pulau-Pulau di Indonesia mempunyai potensi akan sumber daya ekosistem laut yang begitu kaya yakni spesies terumbu karangnya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Olehnya itu, peran organisasi lingkungan seperti WWF sangat diperlukan untuk membantu kerja pemerintah dalam pengelolaan dan pelestariannya. Selain itu, masyarakat sebagai aktor kunci efektivitas pengelolaan kawasan diharapkan partisipasinya dalam membantu

³Dean Genia Ikbal, 2014, 05 Agustus, “*Dari Mana sih Sebenarnya Dana Menjalankan WWF*”, Kredit gogo. Pada <https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-Perbankan/Dari-Mana-sih-Sebenarnya-Dana-Menjalankan-WWF.html>. diakses pada tanggal 18 November 2018pukul 15.20 WIB

pelestarian dan pengelolaan lingkungan laut untuk keberlanjutan pembangunan dimasa yang akan datang.

Pertemuan dalam tingkat Kabupaten Wakatobi juga diadakan pada tahun 2012 lalu yakni simposium internasional yang membahas tentang ancaman pemanasan global yang didalamnya dibahas juga tentang pengelolaan dan pelestarian ikan. Simposium internasional tersebut diikuti Bupati dan Walikota yang wilayah pemerintahannya berupa kawasan pesisir pantai, pejabat penting lainnya seperti Gubernur Sulawesi Tenggara, Dubes Amerika, dan pejabat-pejabat dari United Nations Development Programs, World Bank, Japan International Cooperation Agency, United States Agency International Development, Garuda Indonesia, dan kalangan akademisi (Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanudin Makassar, Essex University London dan dan sejumlah LSM (WWF,TNC). Dengan menghasilkan tujuh kesepakatan tentang pelestarian lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Peserta simposium melahirkan kesepakatan yang disebut Komitmen Wakatobi atau *Wakatobi Charter*. Dimana salah satu topik yang dibahas yaitu tentang upaya konservasi dan pelestarian ikan.⁴

Terpilihnya Wakatobi sebagai salah satu program wilayah kerja WWF di Pulau Sulawesi melihat bahwa potensi sumber daya hayati lautnya begitu tinggi khususnya perikanan. Untuk itu, pengelolaan dan pelestariannya harus dilakukan secara bijak dan berkesinambungan. Wakatobi merupakan Pulau yang terletak di antara Laut Banda dan

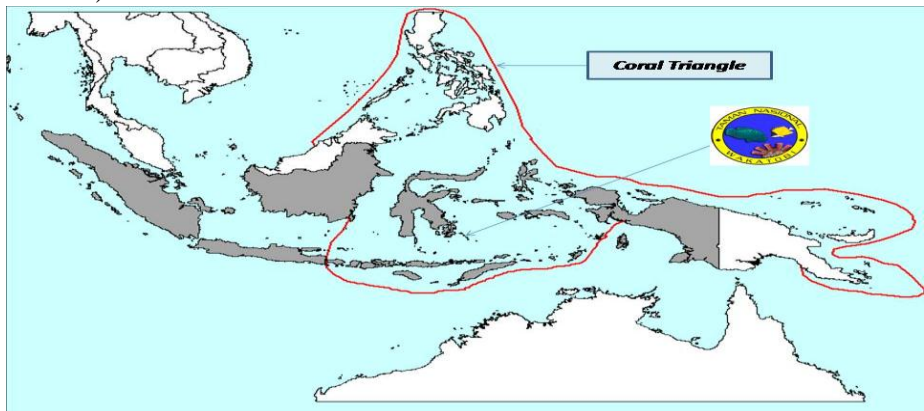
⁴Hugua, 2012, "*Hugua Dari Wakatobi Menawarkan Surgaisme*", La Tofi Enterprise Media : Jakarta, Hal: 16

⁵Hugua, *Opcit* Hal: 41

⁶World Wide Fund For Nature (WWF), "*Wilayah Kerja: Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Konservasi Terpadu Di Wakatobi)*", Pada

Laut Flores sehingga menjadikannya sebagai posisi perairan yang dinamis sebagai “Pusat Segitiga Karang Dunia” (*Coral Triangle Center*) yang memiliki 942 spesies ikan dan 750 jenis karang atau setara dengan 75% terumbu karang dunia. Dibandingkan dengan Carribean (Amerika Latin) yang hanya memiliki 50 jenis karang, dan laut merah (Mesir) hanya 300 jenis karang.⁵ Atas dasar itu, WWF-Indonesia menjadikan Wakatobi sebagai kawasan konservasi untuk dilakukan upaya pencegahan dari berbagai ancaman lingkungan baik dalam maupun dari luar agar kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lautnya.

Gambar 1.1: Peta Pusat Segitiga Karang Dunia (*Coral Triangle Center*)



Sumber: Balai Taman Nasional Wakatobi

Program WWF di Wakatobi mencakup tiga program utama yaitu:

- 1) Survey Dan Pemantauan
- 2) Mata Pencarian Yang Berkelanjutan, Pariwisata, Dan Perikanan,

⁵Hugua, *Opcit* Hal: 41

3) Penjangkauan Dan Penyadartahuan Masyarakat.⁶

Program kerja WWF di Wakatobi sebagian besar berkonsen pada wilayah perairan. Bersama mitra-mitranya sesama organisasi lingkungan seperti *The Nature Conservansy (TNC)* yang hadir di Wakatobi pada akhir tahun 2002 untuk mendukung Balai Taman Nasional Wakatobi (BNTW) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan TNW khususnya terumbu karang dan sumberdaya ikan dalam menjaganya dari ancaman lingkungan yang buruk. Sejak tahun 2007, WWF memang menjadikan terumbu karang sebagai salah satu prioritas konservasi utama bagi kehidupan maritim. *Project Leader* WWF Indonesia Veda Suntiadji mengatakan bahwa Wakatobi berperan penting dalam mengurangi pemanasan global, yang hal itu masih sukar diperankan daerah-daerah lain.⁷

Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Ancaman utama Wakatobi Khususnya Pulau Kaledupa dalam hal konservasi sumberdaya perikanan saat ini adalah kegiatan penangkapan ikan secara *destruktif* yaitu pemboman dan pembiusan ikan yang umumnya dilakukan oleh nelayan lokal maupun luar Wakatobi masih saja terjadi termasuk pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukan zonasi taman nasioanal. Masyarakat Kaledupa sendiri tidak begitu tahu tentang arti penting dari pelestarian keanekaragaman hayati laut khususnya sumberdaya perikanan. Sehingga mereka dengan sesuka hati

⁶World Wide Fund For Nature (WWF), “*Wilayah Kerja: Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Konservasi Terpadu Di Wakatobi)*”, Pada http://www.wwf.or.id/program/wilayah_kerja_kami/sulawesi_nusa_tenggara_papua/konservasi_terpadu_di_wakatobi/ diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 15.20 WIB

⁷ Hugu, *Opcit* Hal: 52

melakukan aktivitas merusak baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Alasannya singkat, mereka ingin mencari keuntungan dengan nilai ekonomis tinggi.

Dari data yang ada, kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan kasus pelanggaran dan asal pelaku terjadinya *destruktif fishing* di Taman Nasional Wakatobi (TNW).

Tabel 1.1: Kasus *destruktif fishing* di Taman Nasional Wakatobi. Tahun 2011 sampai dengan 2015.

| No | Kasus pelanggaran | Asal pelaku | | | | | Jumlah | |
|--------------|---|-------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| | | Bajo mola | Bajo mantigola | Kaledupa | Tomia | Binongko | | Luar Wakatobi |
| 1 | Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan | 7 | | | | 1 | 10 | 18 |
| 2 | Penggunaan potasium dalam penangkapan ikan | | 3 | | | | 1 | 4 |
| 3 | Penangkapan/peredaran satwa yang dilindungi (penyu) | 8 | 1 | | 1 | | | 10 |
| 4 | Pelanggaran zona inti | | | | | | 1 | 1 |
| 5 | Hutan mangrove | | | 1 | | | | 1 |
| Total | | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | =34 |

Sumber: Laporan penanganan kasus *destruktif fishing* di Taman Nasional Wakatobi. Tahun 2011 sampai dengan 2015.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa asal pelaku kasus pelanggaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Wakatobi kurun waktu 2011 s.d 2015, dari 34 kasus yang terjadi, 15 kasus atau 44,11 persen berasal dari masyarakat/nelayan lokal Wakatobi khususnya masyarakat suku bajau Mola dan 12 kasus atau 35,30 persen berasal dari luar Wakatobi.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa upaya konservasi sumberdaya perikanan di Taman Nasional Wakatobi yang di lakukan oleh WWF-Wakatobi bekerjasama dengan Taman Nasional Wakatobi masih kurang berhasil. Penulis menduga bahwa terdapat kelemahan yang menjadi faktor penyebab dalam proses upaya konservasi itu sendiri baik berasal dari faktor internal pelaksana konservasi maupun dari eksternal pelaksana konservasi sehingga pencapaian sasaran konservasi sumberdaya perikanan di Taman Nasional Wakatobi yaitu pencegahan dan pemberantasan kasus pelanggaran atau pengambilan hasil laut tanpa izin seperti penggunaan bahan peledak/bahan kimia (*Potassium cyanida*) dalam penangkapan ikan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang lebih luas baik dari segi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya kurang berhasil⁸.

Pulau Kaledupa sebagai salah satu dari 4 gugusan pulau di Wakatobi memiliki keanekaragaman hayati khususnya perikanan. Salah satu keistimewaan Pulau Kaledupa adalah adanya karang atol dengan Panjang lebih kurang 49.26 km dan lebar 9.75 km yang merupakan atol tunggal terpanjang di Asia Pasifik. Secara administratif Pulau Kaledupa dibagi menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Kaledupa Selatan. Kecamatan Kaledupa terdiri dari 12 (Dua Belas) desa dan 4 (empat) kecamatan dengan luas total 45,50 Km². Dimana jumlah total penduduk periode September 2010 berjumlah 11.994 Jiwa. Sedangkan Kecamatan Kaledupa Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) desa, dengan luasan 58,50 Km².⁹ Dengan jumlah penduduk pada periode September 2010 sekitar 7.698 Jiwa. Sebagian

⁸ Rencana Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi (RPTN) hal 90

⁹Taman Nasional Wakatobi, (2011). "*Rencana Proyek Kampanye Pride Balai Taman Nasional Wakatobi*", Balai Taman Nasional Wakatobi:Wakatobi, Hal: 8

besar penduduk yang ada di Pulau Kaledupa menggantungkan hidupnya pada sumberdaya laut, yaitu sebagai nelayan.

Gambar 1.2: Peta Kabupaten Wakatobi.



Sumber: Sumber: www.wakatobikab.go.id

Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (*connectivity*) ekosistem antar wilayah perairan baik lokal, regional maupun global, yang kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah. Kemudian dimasukkan dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain mengatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik. Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan dengan tetap memelihara dan

meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan” (Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).¹⁰

Secara umum, data yang terkumpul menunjukkan jumlah yang tinggi dari spesies target bernilai komersial tinggi berada di daerah yang usaha perikanannya rendah. Juga, lokasi-lokasi dengan kondisi habitat baik hingga sedang menggambarkan densitas spesies target yang relatif lebih tinggi dibanding yang kualitas habitatnya rendah atau daerah berpasir atau dengan sebaran padang lamun. Di kebanyakan tempat, ikan yang lebih besar hanya ditemukan di kedalaman (>30 m). Pola sebaran vertikal ini merupakan dampak dari kombinasi penurunan habitat di kedalaman dangkal dan tepian terumbu akibat perikanan yang merusak dan penurunan populasi ikan spesies target akibat tingginya upaya perikanan ikan karang hidup. Mayoritas lokasi menunjukkan adanya 1 – 5 spesies target tiap menit pemantauan, dan disekitarnya dari kebanyakan tempat ini ditemukan adanya usaha perikanan pada tingkat rendah sampai menengah. Di lokasi-lokasi yang menunjukkan densitas yang rendah atas spesies target ditemukan pada atau di dekat daerah pelabuhan dekat pemukiman atau di daerah dimana ada usaha perikanan yang sedang hingga tinggi. Kombinasi dari penurunan kondisi habitat disebabkan oleh perikanan yang merusak dan perikanan yang intensitas tinggi dengan menggunakan metode perikanan yang efektif untuk spesies target (termasuk pancing dan perangkap) kelihatannya telah menyebabkan penurunan secara signifikan dari populasi spesies ikan target. Dan secara faktual dilapangan gejala-

¹⁰Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2011, “*Buletin Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*”, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan : Jakarta Vol. 6 No.1 Hal:7

gejala *overfishing* (penangkapan berlebih) dengan cara *destruktif fishing* telah nampak dan dirasakan oleh para nelayan. Untuk itu menjadi sangatlah penting implementasi zonasi secara efektif melalui dukungan kegiatan penyadartahuan dan penegakan hukum terkait (perikanan dan konservasi) untuk mengurangi dampak dari fenomena tersebut.¹¹

Kabupaten Wakatobi memiliki potensi sumberdaya perikanan baik ikan palagis maupun ikan demersal termasuk ikan karang di dalamnya. Besarnya potensi tersebut telah dimanfaatkan begitu lama dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di daerah ini hingga saat ini belum terkelola dengan baik. Disisi lain adanya permintaan pasar yang begitu tinggi mendorong nelayan melakukan eksploitasi secara tak terkendali sehingga pada akhirnya semakin menambah deretan permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. Dengan melihat dinamika yang telah dipaparkan diatas, maka penulis melakukan penelitian dibidang lingkungan khususnya konservasi sumberdaya perikanan. Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu pulau di Taman Nasional Wakatobi (TNW) yakni Pulau Kaledupa sebagai sasaran dari program WWF. Mengingat, lokasi TNW begitu luas maka peneliti memfokuskan pada satu lokasi penelitian agar pembahasannya tidak melebar.

¹¹Taman Nasional Wakatobi, (2011). “*Rencana Proyek Kampanye Pride Balai Taman Nasional Wakatobi*”, Balai Taman Nasional Wakatobi:Wakatobi, Hal: 18

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Program *World Wide Fund for Nature* (WWF) Dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Perikanan Di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa Provinsi Sulawesi Tenggara”**

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat program WWF dalam upaya konservasi sumberdaya perikanan di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa.

C. Kontribusi Riset

1. Praktis

- a. Menjadi bahan kajian yang akurat bagi civitas akademika yang tertarik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam studi hubungan internasional khususnya peran INGO dalam era kontemporer saat ini.
- b. Dapat menjadi wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah/ skripsi dan tesis.

2. Akademis

- a. Tesis ini dapat memperkaya kajian mengenai konservasi sumberdaya perikanan
- b. Tesis ini juga mampu mengembangkan sebuah gagasan tentang konservasi sumberdaya perikanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka *research question* penelitian ini adalah:

“Bagaimana Peran WWF dan Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Program WWF Wakatobi dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Perikanan di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa?”

E. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan sebuah topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, maupun sumber-sumber tertulis baik secara cetak maupun elektronik lain.

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Untuk melakukan tinjauan pustaka, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan

informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan.

Dalam penelitian tesis yang berjudul: **“Program *World Wide Fund for Nature* (WWF) Dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Perikanan Di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa Provinsi Sulawesi Tenggara”** menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti tentang program atau bentuk upaya dalam beberapa persoalan atau masalah, dan pembahasan yang berkaitan dengan judul tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Dermawan Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2007. Dengan Tesis yang berjudul *“Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Yang Menunjang Perikanan Berkelanjutan Pada Era Otonomi Daerah. (Studi Kasus Taman Nasional Bunaken Dan Daerah Perlindungan Laut Blongko Sulawesi Utara)”*. Tesis ini membahas Perairan laut Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman akibat aktivitas manusia maupun alam. Pemanfaatan sumber daya alam berlebih (*over exploitation*) serta pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara-cara yang bersifat merusak lingkungan merupakan andil terbesar penyebab utama kerusakan. Salah satu cara efektif untuk menangani persoalan ini adalah dengan cara menyisihkan sebagian ekosistem pesisir dan laut kita sebagai kawasan konservasi laut yang menunjang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi laut, mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi pengelolaan Taman Nasional (TN) Bunaken dan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Blongko serta

rekomendasi alternatif kebijakan pengelolaan kawasan konservasi laut yang menunjang perikanan berkelanjutan.¹²

Penelitian Agus, merumuskan definisi kawasan konservasi laut di Indonesia. Faktor dominan yang mempengaruhi pengelolaan TN Bunaken dan DPL Blongko pada era otonomi daerah adalah adanya aspek legal seperti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dukungan dari pembiayaan dari LSM lokal, nasional dan internasional serta lembaga donor yang bergerak dibidang konservasi, serta adanya penghargaan internasional dibidang konservasi laut di Sulawesi Utara. Hasil penelitian merekomendasikan alternatif kebijakan yang tepat adalah melaksanakan penguatan pengelolaan kawasan konservasi laut skala nasional dan lokal dalam satu kesatuan jaringan kawasan konservasi laut (KKL) serta pengembangan pengelolaan zonasi Taman Nasional Bunaken dengan dukungan data ilmiah yang memadai dengan mempertimbangan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Asrina Nasiru dan Muslim Tadjuddah Mahasiswa Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo 2014. Dengan penelitian yang berjudul “*Distribusi suhu permukaan laut secara spasial dan temporal hubungannya dengan hasil tangkapan*”

¹² Agus, D. (2007). “*Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Yang Menunjang Perikanan Berkelanjutan Pada Era Otonomi Daerah. (Studi Kasus Taman Nasional Bunaken Dan Daerah Perlindungan Laut Blongko Sulawesi Utara)*”. Pascasarjana IPB: Bogor

Madidihang di Perairan Wakatobi”. Penelitian ini membahas salah satu parameter yang mempengaruhi distribusi madidihang adalah suhu permukaan laut (SPL). Kemudian dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi sebaran suhu permukaan laut secara spasial dan temporal serta menguji hubungan suhu permukaan laut dengan hasil tangkapan madidihang (*Thunnus albacares*) yang menggunakan alat tangkap pancing tonda di perairan Wakatobi. Data yang didapat yaitu data suhu permukaan laut harian yang diperoleh dari sensor satelit Aqua-MODIS level-2 dan data hasil tangkapan perunit upaya penangkapan (CPUE) madidihang dari nelayan Waha dan Mola yang ada di Wakatobi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi suhu permukaan laut di perairan Wakatobi berada pada kisaran 26.00°C – 32.45°C dengan nilai suhu rata-rata 28.44°C. Pola spasial suhu permukaan laut menggambarkan pola sebaran massa air yang lebih dingin bergerak dari arah timur menuju bagian barat kepulauan Wakatobi. Kemudian pola ini berganti menjadi kumpulan massa air yang tidak beraturan dengan massa air yang lebih hangat cenderung berada pada bagian selatan kepulauan Wakatobi (tepatnya di sekitar P. Binongko). Madidihang dapat tertangkap pada kisaran suhu 26.00°C – 30.81°C dan dominan tertangkap pada kisaran 28.00°C – 29.82°C. Suhu permukaan laut menunjukkan adanya hubungan terhadap hasil tangkapan madidihang dan suhu optimum penangkapan.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Eka Agusliana M mahasiswa Ilmu Perikanan Pascasarjana Universitas Halu Oleo, dengan judul tesis ‘*Pengembangan Perikanan Tangkap Berbasis Optiasi Sumberdaya*

¹³Wa Ode Asrina Nasiru dan Muslim Tadjuddah. (2014). “*Distribusi suhu permukaan laut secara spasial dan temporal hubungannya dengan hasil tangkapan Madidihang di Perairan Wakatobi*”. Universitas Halu Oleo: Kendari

Ikan Pelagis Besar Di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara”. Tesis ini membahas pemanfaatan sumberdaya perikanan yang melimpah dengan memaksimalkan pengembangan perikanan tangkap berbasis optimasi sumberdaya ikan pelagis. Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu wilayah dengan sumberdaya perikanan yang cukup melimpah yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Sumberdaya perikanan di Kabupaten Wakatobi dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian 26.174 orang nelayan atau sekitar 27,61% dari jumlah populasi. Ikan pelagis besar yang dominan ditangkap oleh nelayan adalah tongkol (*Auxis thazard*), cakalang (*Katsuwonus pelamis*), dan tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*). Alat tangkap yang digunakan adalah pancing tonda dan pancing ulur yang dioperasikan oleh 1 sampai 2 orang nelayan per unit perahu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kelayakan usaha penangkapan ikan pelagis besar dilihat dari aspek teknologi penangkapan ikan yang digunakan, menentukan teknologi penangkapan ikan pelagis besar yang efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan aspek biologi, teknis, sosial, dan keramahan lingkungan di Kabupaten Wakatobi, mengalokasikan jumlah unit penangkapan ikan pelagis besar yang optimum, dan mengetahui strategi pengembangan teknologi penangkapan ikan pelagis besar di Kabupaten Wakatobi.¹⁴

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh WWF Indonesia dengan judul “*Satu Dekade Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi: Keberhasilan Dan Tantangan Konservasi Laut*”. Laporan ini mengkaji kondisi ekosistem, sosial dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut

¹⁴ Sri Eka Agusliana M. (2019). “*Pengembangan Perikanan Tangkap Berbasis Optimasi Sumberdaya Ikan Pelagis Besar Di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara*”. Universitas Halu Oleo: Kendari

Taman Nasional Wakatobi selama satu dekade. Kajian dan evaluasi kondisi ekologi, sosial dan budaya TNW dalam satu dekade penetapan zonasi TNW (2007-2017). Dengan luas laut mencapai 97% dari luas daratan, Wakatobi merupakan biodiversity hotspot bagi perairan timur Indonesia. Tercatat 396 spesies karang keras dan 942 spesies ikan karang ditemukan dalam kawasan TNW. Selain biota ekosistem terumbu karang, Wakatobi juga menjadi habitat bagi spesies megafauna seperti paus, lumba-lumba dan penyu. Kekayaan hayati laut Wakatobi menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Wakatobi sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan. Informasi ini diperoleh dengan menganalisis data primer dan sekunder yang dikumpulkan sejak tahun 2006 oleh pihak Balai TNW bersama mitra (Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Universitas Haluleo, WWF dan TNC). Data ekosistem terumbu karang dikumpulkan dengan metode titik garis menyinggung (Point Intercept Transect – PIT) visual sensus bawah air (Underwater visual census – UVC). Luas habitat terumbu karang, lamun dan mangrove di ukur dengan menggunakan citra satelit tahun 2002, 2006, 2012 dan 2016. Data perikanan diperoleh dari resource use monitoring (RUM). Survei ini menggunakan teknik wawancara nelayan yang ditemui pada saat tim berlayar di rute yang telah ditentukan (sortie). Data sosial-ekonomi dikumpulkan dengan menggunakan teknik diskusi grup terkumpul (Focus Group Discussion – FGD) dan wawancara informan kunci (Key Informant Interview – KII).¹⁵

¹⁵ WWF Indonesia. (2016). *“Satu Dekade Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi: Keberhasilan Dan Tantangan Konservasi Laut”*: Jakarta

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Radityo Pramoda dan Sonny Koeshendrajana Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tahun 2012, dengan judul “*Kebijakan Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan*”. Penelitian ini membahas Sumber daya perikanan yang tersebar di wilayah Indonesia, jika tidak dikelola secara lestari akan punah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, adalah membuat peraturan yang menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan konservasi/dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan konservasi yang termuat di dalam UU No. 27/2007, PP No. 60/2007, dan UU No. 45/2009. Analisa kajian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan, bahwa terminology konservasi menurut ketiga peraturan tersebut, belum bisa memberikan pemahaman yang cukup mengenai istilah konservasi; peran pemerintah daerah dan masyarakat adat/lokal masih belum transparan diatur tata kelolanya di lapangan, serta pembagian hak atas wilayah yang telah dijadikan kawasan konservasi. Pembinaan pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan, dapat dilakukan dengan merefleksikan perencanaan dan penataan ruang yang baik, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kolaboratif, kebijakan dan peraturan yang adil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. UU No. 27/2007, PP No. 60/2007, dan UU No. 45/2009, perlu untuk direvisi agar dapat membangun kawasan konservasi yang berkelanjutan serta menciptakan keadilan.¹⁶

¹⁶ Radityo Pramoda dan Sonny Koeshendrajana. (2012). “*Kebijakan Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan*”. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan: Jakarta

- Perbedaan Tesis ini dengan Penelitian Sebelumnya

Perbedaan tesis ini dengan seluruh sumber studi pustaka di atas adalah, tesis ini membahas tentang Program *World Wide Fund For Nature* (WWF) dalam upaya konservasi sumberdaya perikanan Di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejauh ini, peneliti belum menemukan tesis atau penelitian lain yang serupa. Belum ada penelitian yang meneliti mengenai program WWF dalam upaya sumberdaya perikanan di Wakatobi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi textual dan temuan data juga akan didukung dan dilengkapi dengan data hasil wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan subjek penelitian yang kredibel menjawab pertanyaan peneliti. Subjek utama dalam tesis ini adalah WWF sebagai pihak yang membuat dan mengeluarkan program. Subjek dari WWF diwakili oleh Sugiyanta sebagai Project Leader yang memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait program.

Subjek penelitian lain adalah Bapak Dodi, Kepala Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Lembaga ini dipilih menjadi narasumber karena merupakan mitra kerja WWF dalam beberapa program konservasi yang memiliki otoritas penuh terhadap masalah kelautan dan mengetahui dengan baik mengenai regulasi terkait konservasi pengelolaan sumberdaya hayati khususnya perikanan. Oleh karena itu, dalam tesis ini juga dibahas mengenai regulasi terkait dengan topik permasalahan. Tidak hanya itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para nelayan sebagai aktor utama yang menjadi sasaran program WWF dan yang bersinggungan langsung

dengan sumberdaya. Selain studi textual dan wawancara, tesis ini juga dilengkapi dengan data-data sumberdaya perikanan maupun ancaman terhadap sumberdaya perikanan. tersebut diperoleh langsung dari WWF Wakatobi, Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, serta SPTN II Kaledupa. Keragaman data inilah yang membuat tesis ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

Berakhirnya perang dingin pada akhir tahun 1990-an memunculkan tatanan baru dalam dinamika perkembangan studi hubungan internasional. Perubahan aktor dan isu tidak lagi melulu membahas tentang peran dominasi pemerintah disuatu negara serta isu-isu *high politic* seperti militer, perang dan keamanan. Munculnya aktor dan isu-isu hubungan internasional saat ini, lebih condong ke peran aktor non-pemerintah seperti organisasi internasional yang dikenal dengan *International Non-Government Organization (INGO)* dengan mengangkat isu-isu *middle* seperti kemanusiaan, gender, ekonomi lingkungan dan lain sebagainya. Masuknya aktor-aktor baru seperti organisasi non pemerintah (*INGO*) semakin mewarnai peta politik global dalam hubungan internasional. Saat ini, banyak organisasi non-pemerintah yang turut bekerjasama dengan pemerintah suatu negara untuk sebuah program atau *project* tertentu. Aktor non negara seperti *INGO*, Jaringan dan Koalisi, dan Gerakan Sosial dapat digolongkan menjadi aktor non profit (yang tidak mencari keuntungan). Aktor-aktor non profit seperti *INGO* adalah bentuk gerakan yang ingin

memperjuangkan kepentingan umat manusia terkait permasalahan dalam bidang kemanusiaan, keamanan dan masalah lingkungan.¹⁷

Lewis dalam artikelnya mengklasifikasikan *INGO* menjadi dua tipe berdasarkan apa yang menjadi kegiatan dan tujuannya. *Tipe pertama*, adalah *INGO* yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Contohnya *OXFAM*, *MSF*, dan *World Vision*. *Tipe kedua*, adalah *INGO* yang bergerak secara khusus untuk advokasi kebijakan serta kampanye publik untuk mengejar perubahan sosial. Contohnya *World Wide Fund For Nature (WWF)* yang konsen terhadap isu lingkungan yang kemudian saat ini sudah menjadi salah satu isu utama dalam agenda politik internasional.¹⁸

A. Internasional Non-Government Organization (INGO)

Perubahan politik global yang antara lain ditandai dengan menguatnya peran aktor non pemerintah merupakan sebuah dinamika baru dalam konstalasi hubungan internasional. Peran *non state actors* seperti *INGO* saat ini sudah banyak mendapat respon dari masyarakat internasional terkait dengan perannya yang bersifat independen (mandiri) dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang *urgent* di dunia internasional.

INGO merupakan salah satu bentuk klasifikasi umum dari organisasi internasional. Untuk lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan *International Non Governement Organization (INGO)* atau dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan Organisasi Internasional

¹⁷ Margareth P. Karns and Karen A Mingst, 2004, "*International Organization; The Politics and Processes of Global Governance*", Lyne Rienner Publisher : London, Hal 211

¹⁸David Lewis, 2009, "*Nongovernmental Organization, Definition and History*, [PDF] London School of Economic and Political Science", Pada <http://personal.lse.ac.uk/lewisd/images/encylciv%20societyngos2009-dl.pdf> diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 10.00 WIB

Non Pemerintah, terlebih dahulu kita perlu memahami organisasi internasional itu sendiri. Organisasi internasional merupakan salah satu dari aktor non negara yang memiliki peranan penting dalam dinamika hubungan internasional.

Keterlibatan organisasi internasional dewasa ini, berkembang hingga menyentuh keseluruhan bidang kehidupan, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi hubungan internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam dialektika interaksi antar aktor hubungan internasional. Organisasi internasional sendiri telah menunjukkan peranan, eksistensi, dan status yang eksklusif, serta personalitas hukum bahkan hak-hak khusus seperti adanya imunitas bagi staf organisasi internasional, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di negara-negara anggota. Kerjasama yang kemudian timbul antara organisasi internasional dan negara, menjadikan negara harus bersedia membuka diri atas kedaulatannya.

Dalam melakukan program kerjanya, organisasi internasional mempunyai unsur-unsur tersendiri yang membanggunya. Unsur-unsur yang membentuk suatu organisasi internasional tersebut adalah kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun non pemerintah, terdapat struktur organisasi yang jelas dan lengkap, serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.¹⁹ Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh suatu organisasi internasional.

¹⁹Teuku May Rudy, 1993, "*Administrasi dan Organisasi Internasional*", PT. ERESKO: Bandung, Hal : 3

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional mengindikasikan semakin signifikannya peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja, namun telah diakui pula keberadaan organisasi-organisasi non pemerintah yang dalam segi jumlahnya mengalami peningkatan. Organisasi non pemerintah atau juga dikenal dengan *INGO* menjadi mitra pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan memposisikan diri sebagai media kontrol yang memiliki posisi yang menentukan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri juga bahwa negara tetap merupakan faktor paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerja sama internasional. Adanya perbedaan anggota organisasi internasional mengakibatkan terjadinya pengklasifikasian organisasi internasional berdasarkan ciri-ciri tertentu.

Organisasi Internasional menurut T. May Rudy didefinisikan sebagai berikut:²⁰

"Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda".

Dari definisi di atas, sangat jelas bahwa WWF sebagai salah satu organisasi internasional atau *INGO* merupakan suatu organisasi internasional yang mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni pengawasan terhadap lingkungan hidup dengan tujuan untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi

²⁰Teuku May Rudy, 2009, "*Administrasi Dan Organisasi Internasional*", Refika Aditama:Bandung, Hal:93-94

serta membangun masa depan, dimana manusia hidup selaras dengan alam dengan struktur organisasi yang jelas serta mampu melaksanakan kerjasama dengan aktor-aktor lainnya.

Lebih lanjut Teuku May Rudy mengemukakan klasifikasi organisasi internasional berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Kegiatan administrasi: organisasi internasional antar-pemerintah dan organisasi internasional non pemerintah.
- 2) Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
- 3) Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai dan perdagangan internasional, dan lain-lain.
- 4) Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
- 5) Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum, global- khusus, regional-umum, dan regional-khusus.
- 6) Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*).
- 7) Bentuk dan pola kerjasama: kerjasama pertahanan keamanan (*collective security*) yang biasanya disebut “*institutionalized alliance*” dan kerjasama fungsional (*functional cooperation*).
- 8) Fungsi organisasi: organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-

²¹ Teuku May Rudy, *Opcit*, Hal: 5

masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif; dan organisasi peradilan (*judicial organization*), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai ketentuan internasional dan perjanjian internasional).

Suatu organisasi internasional dapat masuk dalam dua atau lebih bentuk pengklasifikasian, tergantung pada segi yang ditinjau dalam pengklasifikasiannya. Klasifikasi ini menjadi sebuah gambaran bagi suatu organisasi internasional terkait dengan program kerjanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang disepakati bersama. Adanya keinginan untuk bekerja sama inilah yang menjadi pokok penting dalam pendirian organisasi internasional.

Berdasarkan klasifikasi diatas, WWF masuk ke dalam beberapa klasifikasi sekaligus. Dimana WWF tergolong sebagai organisasi internasional non pemerintah *INGO* dan berdasarkan ruang lingkupnya. WWF termasuk dalam organisasi internasional global yang ditandai dengan jumlah negara yang menjadi anggota serta mitra kerjanya yang berada di seluruh belahan dunia. Selain itu berdasarkan tujuannya, WWF termasuk dalam klasifikasi organisasi internasional khusus dengan ditandai oleh kegiatannya yang berpusat pada lingkungan hidup yaitu dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati baik di darat maupun di laut. Dalam konsep organisasi internasional ini, penulis merujuk pada organisasi internasional non pemerintah (*INGO*) yang menjadi subjek pembahasan. *INGO* menurut Peraturan Pemerintah RI

Nomor 23 Tahun 2008²² adalah: “*Suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara lembaga internasional yang bebas dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan*”.

Beberapa ahli hubungan internasional dalam mendefinisikan *INGO* seringkali merujuk pada definisi *NGO*. Seperti halnya definisi Berridge G. R dan Alan James mengenai definisi *NGO*²³ yakni:

“...is a private, non-profit making body which has an international membership. Such bodies, especially when granted observer status, are often active in international organizations and major conferences...NGOs are sometimes referred to as international nongovernmental organizations (INGOs).”

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa *INGO* adalah salah satu dari penggolongan atau varietas dari *INGO*. *INGO* sesuai dengan definisi diatas, adalah organisasi non pemerintah yang bersifat internasional. Sementara untuk cara kerja dan fungsinya memiliki kesamaan dengan *NGO* (*National Government Organization*). Yang kemudian membedakan antara *NGO* dan *INGO* adalah hanya pada keanggotaan organisasi mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya. Kalau *NGO* merupakan organisasi non pemerintah yang mempunyai ruang lingkup/wilayah di satu negara saja sedangkan *INGO* ruang lingkup/wilayahnya tersebar hampir diseluruh belahan dunia. Dalam tesis ini, penulis mengambil *INGO* sebagai

²² Pasal 1 (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

²³G. R. Berridge dan Alan James, 2003, “*A Dictionary of Diplomacy*”, Palgrave MacMillan: New York: Hal : 187. Pada <http://www.ngo.org>. Diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 10.00 WIB

rujukan konseptual, dimana WWF yang menjadi studi kasus penelitian adalah salah satu dari *INGO*.

Bentuk *INGO* mulai dikenal pada tahun 1846. Yang tercatat sebagai *INGO* pertama, dalam berbagai literatur, adalah *World's Evangelical Alliance (WEA)* (Perhimpunan Penginjil Sedunia). Kemudian menyusul terbentuknya beberapa *INGO* lainnya, sejak pertengahan abad ke XIX (sekitar tahun 1860). Seiring dengan berkembangnya kerja sama internasional dalam bentuk organisasi-organisasi internasional antar-pemerintah (*IGO*).²⁴ *INGO* adalah organisasi yang paling mampu menjembatani berbagai kesulitan yang dihadapi aktor-aktor lain dalam penyelesaian berbagai persoalan. Maka dalam hal ini *INGO/WWF* memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah negara.

Noeleen Heyzer mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh berbagai *INGO* yaitu²⁵ :

- 1) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
- 3) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Istilah *INGO* digunakan sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, tepatnya pada Piagam PBB Pasal 71 Bab 10 tentang peranan

²⁴Teuku May Rudy, *Opcit*, Hal: 21

²⁵ Noeleen Heyzer, *et al*, dalam Affan Gafar, 2005, "*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*", Pustaka Pelajar : Yogyakarta, Hal : 8

konsultatif *INGO*. Defenisi “*international non-government organization*” pertama kali diberikan dalam resolusi 288 (X) Dewan Economy dan Social (ECOSOC) pada 27 Pebruari 1950. Awalnya istilah ini digunakan untuk membedakan antara hak partisipatif badan-badan pemerintah (*intergovernmental agencies*) dan organisasi-organisasi swasta international (*international private organizations*).²⁶

PBB mendefinisikan *INGO* yaitu: “*those private organizations which commonly gain financial support from international agencies and which devote themselves to the design, study and execution of program and projects in developing country*”.²⁷ Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *INGO* merupakan sebuah organisasi privat atau swasta yang dalam kegiatannya mendapatkan dukungan keuangan atau donor dari agensi internasional yang bertujuan untuk merencanakan, mempelajari serta melakukan berbagai program dan proyeknya sesuai dengan tujuan organisasi di negara-negara berkembang.

Secara lebih eksplisit, kegiatan *INGO* digolongkan oleh Olena P. Maslyukivska,²⁸ yaitu:

- 1) *Development and operation of infrastructure* (pengembangan dan pengoperasian infrastruktur)
- 2) *Supporting innovation, demonstration and pilot projects* (mendukung inovasi, demonstrasi dan proyek utama)
- 3) *Facilitating communications* (memfasilitasi komunikasi)

²⁶ Suherman Ade Maman, 2003, “*Organisasi Internasional dan Integrasi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*”, Ghalia Indonesia: Jakarta, Hal: 202

²⁷ Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dan Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri, 2011, Direktori Organisasi Internasional Non- Pemerintah (OINP) di Indonesia, Jakarta: Kementerian Luar Negeri, Hal: 2. Dalam skripsi Khairun Nisa, 2013, “*Peranan International Non Government Organization (INGO) dalam Penanggulangan Kasus Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan (Studi Kasus: International Catholic Migration Commission)*”, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik FISIP : Universitas Hasanuddin: Makassar Hal: 28

²⁸ Ibid: Hal: 25

- 4) *Technical assistance and training* (bantuan teknis dan pelatihan)
- 5) *Research, monitoring, and evaluations* (penelitian, pemantauan dan evaluasi)
- 6) *Advocacy for and with the poor* (advokasi bersama dengan orang yang membutuhkan)

Keenam kegiatan tersebut dilaksanakan oleh *INGO* dalam hal ini WWF untuk mencapai tujuan dari berbagai program-program yang direncanakan dalam hal konservasi keanekaragaman hayati khususnya dalam upaya konservasi sumberdaya perikanan di Pulau Kaledupa.

Berdasarkan UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa perundang-undangan ini merupakan hal utama bagi proses masuknya *INGO* di Indonesia. *INGO* yang akan melakukan kegiatan di Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut²⁹:

- 1) Berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- 2) Tidak melakukan kegiatan politik di Indonesia;
- 3) Tidak melakukan kegiatan penyebaran keagamaan di Indonesia;
- 4) Tidak melakukan kegiatan komersial yang mendatangkan keuntungan;
- 5) Tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana(fund-raising) di Indonesia

Sifat *INGO* yang independen (mandiri) membentuk pandangan serta keyakinan mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi secara bersama-sama, karena (mereka) *INGO* bukanlah sebuah organisasi yang di dalamnya terdiri dari beberapa negara

²⁹ *Ibid*, Hal : 18

melainkan terdiri dari sekumpulan orang-orang yang dengan sukarela bergabung dan pada akhirnya bisa bersatu, serta menyumbangkan ide-ide cemerlang mereka didalam organisasi tersebut tanpa ada kepentingan pribadi satu anggota yang mendominasi.

Kemandirian dan independensi dari *INGO* atas seluruh aktivitasnya berpijak atas dasar kebebasan dan otonomi yang dimiliki secara kelembagaan dan mempunyai hak seorang *personal* untuk mengatur, memutuskan dan menggerakkan roda organisasinya (*self governing*). *INGO* bukan bagian dari perpanjangan tangan pemerintah seperti halnya *IGO* (*International Government organizations*). Bukan *underbow* partai tertentu dan bukan investasi bagi sektor bisnis. Dalam hal finansial atau pembiayaan, *INGO* bersandar pada kedermawanan dari pihak lain melalui donasi yang didapatkan dari negara-negara internasional, lembaga, perusahaan-perusahaan, pihak swasta maupun individu. Bantuan keuangan tersebutlah yang kemudian disalurkan *INGO* di wilayah negara-negara yang menjadi mitra kerjanya. Secara tidak langsung para pendonor melalui *INGO* memberikan bantuannya kepada negara-negara tersebut. Bantuan ini lebih dikenal dengan istilah bantuan luar negeri atau bantuan asing.

Dalam peraturan masyarakat internasional, peran *INGO* semakin signifikan dalam melakukan loby bahkan pengambilan keputusan suatu wilayah atau konferensi internasional. WWF sebagai salah satu *INGO* advokasi bidang lingkungan hidup, secara langsung memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya konservasi di Indonesia khususnya di TNW Wakatobi. Mengingat, ancaman *global warming* saat ini sudah sangat memprihatinkan khususnya kerusakan yang terjadi pada ekosistem laut yang disertai ancaman kerusakan karang, kurangnya habitat ikan (tempat pemijahan ikan) akibat ulah manusia

maka kehadiran lembaga internasional di bidang lingkungan hidup seperti WWF ini tidak lepas dari realitas masyarakat internasional yang selalu ingin bertindak praktis dan konsumtif terhadap sumber daya alam namun kurang begitu hirau dengan aspek keberlanjutan lingkungannya sendiri. Apalagi mengingat dewasa ini, isu lingkungan merupakan isu penting dan krusial yang harus dijaga keberlanjutannya.

G. Hipotesa

Hipotesa yang dapat dikemukakan pada tesis ini yaitu: Peran WWF dalam upaya konservasi sumberdaya perikanan yaitu: bekerjasama dengan pemangku kepentingan, memanfaatkan pengetahuan lokal dan modern, pengendalian terhadap aktivitas masyarakat, pengalokasian terhadap sumberdaya, memberikan pilihan dan tujuan publik, serta mendukung otoritas pengelola. Sedangkan, faktor-faktor penghambat program WWF adalah: adanya ancaman terhadap sumberdaya perikanan Kaledupa dan adanya tantangan teknis yang menjadi penghambat terhadap pencapaian program WWF Wakatobi.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yang dimaksud ialah untuk memberikan gambaran secara jelas tentang peran *INGO* yaitu WWF dalam melakukan upaya konservasi sumberdaya perikanan di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu 1. *Data primer*, 2. *Data sekunder*. *Data primer* penulis peroleh dari penelitian langsung di lapangan yaitu di Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Sedangkan *data sekunder* penulis dapatkan dari hasil analisa telaah pustaka dengan mengumpulkan literatur selama penelitian yaitu berupa buku, dokumen, jurnal, laporan, website diinternet serta data lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan baik secara komersial maupun non komersial.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian yang berlokasi di Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

- a) Tinjauan langsung di lapangan tepatnya di beberapa instansi serta desa-desa di wilayah konservasi sumberdaya perikanan pulau Kaledupa, yakni :
 - Kantor perwakilan WWF di Wakatobi tepatnya di Pulau Wangi-Wangi JL. Jenderal Sudirman Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
 - Kantor Balai Taman Nasional Wakatobi di Pulau Kaledupa
 - Kantor Bupati Wakatobi JL. Samburaka, No. 4 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi.
 - Desa di Kecamatan Pulau Kaledupa.
- b) Wawancara langsung dengan narasumber terkait yaitu Ketua Koordinator WWF serta fasilitator WWF di Wakatobi, Ketua Balai Taman Nasional di Wakatobi, Bupati Wakatobi, serta masyarakat desa di Kecamatan Pulau Kaledupa di Wakatobi.

c) Telaah Pustaka, yaitu analisa literatur yang didapat dari berbagai sumber dan tempat yakni:

➤ Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Tekhnik Analisa Data

Tesis ini menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Teknik analisis ini mampu menunjang penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti. Teknik analisis interaktif Miles dan Huberman terdiri dari tiga komponen, yaitu³⁰:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Analisis menggunakan reduksi data yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, meringkas serta membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga pada akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun berbagai informasi ataupun data yang telah diperoleh sehingga memudahkan peneliti menuju penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

³⁰ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm: 104-105.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi tulisan ini menjadi

5 (lima) bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kontribusi riset, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum *World Wide Fund for Nature* (WWF), Taman Nasional Wakatobi, dan Regulasi:

- A. Organisasi WWF Internasional
- B. Deskripsi WWF-Indonesia
- C. Profil WWF Wakatobi
- D. Kawasan Taman Nasional Laut Wakatobi (TNW)
- E. Konservasi Sumberdaya Perikanan

BAB III: Program WWF Wakatobi

- 1) Survey Dan Pemantauan
- 2) Mata Pencarian yang Berkelanjutan, Pariwisata, Dan Perikanan,
- 3) Penjangkauan Dan Penyadartahuan Masyarakat.

BAB IV: Peran WWF dan Faktor-Faktor Penghambat Program WWF Wakatobi Dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Perikanan Di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa

- A. Peran WWF dalam upaya konservasi sumberdaya perikanan di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa
- B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program WWF Wakatobi
- C. Pencapaian Program WWF-Wakatobi dan Hambatannya

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini yang berisi kesimpulan dan saran sebagai sumbangsi terhadap pemikiran berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.